

**EVALUASI PROGRAM  
KELUARGA BERENCANA DI  
KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Agung Alsyadat  
151010080**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**EVALUASI PROGRAM  
KELUARGA BERENCANA  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat**

**Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:  
Agung Alsyadat  
141010022**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saaya sendiri, tanpa bantuan pihak alin, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma yang belaku di perguruan tinggi.

Batam, 05 September 2019  
Yang membuat pernyataan

Agung Alsyadat  
151010080

**EVALUASI PROGRAM  
KELUARGA BERENCANA  
DI KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:  
Agung Alsyadat  
151010080**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 05 September 2019**

**Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk berimbas kepada kesejahteraan penduduk di Kota Batam. Dampak dari tingginya pertumbuhan penduduk salah satunya banyaknya pengangguran. Akibat banyaknya pengangguran berimbas kepada banyaknya kasus kriminalitas saat ini di Batam. Dari permasalahan tersebut program KB sangat diperlukan agar pertumbuhan penduduk bisa terkendali. Program keluarga berencana diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam ternyata masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, hal ini yang menyebabkan semakin bertambahnya penduduk di Kota Batam. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi program KB dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa sasaran dari program keluarga berencana belum mencapai target yang di rencanakan namun program KB sudah tepat guna bagi masyarakat dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam, walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya tetapi hasil dari program KB sudah bisa dilihat dari data angka kelahiran terjadi penurunan setiap tahunnya, program KB di Kota Batam sudah tepat untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, memberi jarak kelahiran sesuai dengan keinginan akseptor atau pengguna KB. Program tersebut dapat dikatakan tepat guna dalam penerepan dan pengimplementasiannya.

**Kata Kunci :** *Evaluasi, Program KB, Kota Batam.*

## **ABSTRACT**

*With the continued increase in population has an impact on the welfare of the population in Batam. The impact of high population growth is one of them being unemployment. Due to the large number of unemployed, it has an impact on the number of criminal cases currently in Batam. From these problems the KB program is needed so that population growth can be controlled. The purpose of this study is to evaluate family planning programs in controlling the rate of population growth. The method in this study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the study found that there were several targets of the family planning program that had not yet reached the planned target but the KB program was appropriate for the community in controlling the population growth rate in Batam City, although it was not maximal in its implementation but the results of the KB program could be seen from the data figures births decline every year, family planning programs in Batam City are appropriate for controlling population growth, giving birth spacing in accordance with the wishes of acceptors or users of family planning. The program can be said to be appropriate in its lead and implementation.*

**Keywords:** *Evaluation; KB program; Batam City*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ajuh dari sempurna, karena itu kritik dan senantiasa penulis terima dengan senang hati dengan segala keterbatasa, penuliis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI Selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP. M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
3. Bapak Karol Teovani Lodan, S.AP., M.AP Selaku Pembimbing Akademik Pada Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis menuntut Ilmu di Universitas Putera Batam
4. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si Selaku Pembimbing Skripsi penulis Pada Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis menuntut Ilmu di Universitas Putera Batam.
5. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.

6. Bapak/ibu Dosen pengajar Di Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman serta motivasinya.
7. Ibu Dina Mariana selaku Kasubbid Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di BKKN Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi informan penulis.
8. Ibu Indah Mastikana selaku Sekretaris Prodi Kebidanan Stikes Awal Bros yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi informan penulis.
9. Ibu Rahmida selaku Masyarakat Sagulung yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi informan penulis.
10. Ibu Rahmatia selaku Masyarakat Nongsa yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi informan penulis.
11. Ibu Rukniati selaku Masyarakat Nagoya yang telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi informan penulis.
12. Kedua orang tua, Bapak Kobri dan Ibu Rohani (Almh) yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta mendoakan agar tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan studi.
13. Hadima, Muharom, Nurhalipa, Linda, Rukniati, Leni Aptarina, Rahmawita, Rosika Abang dan Kakak yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta mendoakan agar tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras dalam menyelesaikan studi.



14. Seluruh teman-teman Prodi Administrasi Negara angkatan 2015 Khususnya Ferianto Kasmadi, Frisma Kusuma Dewi, Vivi Kurniati, Nurjannah, Irfan Syahreza, Aidil Alimudin, Fendi Wahyu Purwoko yang selalu memberikan semangat.
15. Mina Aprianta Sinamo yang selalu memberi dukungan dan semangat.
16. Rekan kerja di Holiday Hotel yang selalu memberi dukungan dan semangat.
17. Serta semua pihak yang memberikan masukan, kritikan dan bantuan yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan dan memberikan hidayah dan karunia-Nya, Amin.

Batam, 05 September 2019

Agung Alsyadat

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b>	
<b>Halaman Judul</b>	
<b>Halaman Pernyataan</b>	
<b>Halaman Pengesahan</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Peneltian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	10
2.2 Formulasi Kebijakan .....	11
2.3 Implementasi Kebijakan.....	13
2.4 Evaluasi Kebijakan.....	14
2.4.1 Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik.....	15
2.4.2. Indikator Kebijakan .....	16
2.4.3 Dimensi Evaluasi .....	17
2.4.4 Pendekatan Evaluasi Kebijakan.....	18
2.5 Program .....	19
2.6 Evaluasi Program .....	21
2.7 Program Keluarga Berencana (KB) .....	24
2.8. Penelitian Terdahulu.....	28
2.9. Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Fokus Penelitian .....	34
3.3 Sumber Data .....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.5 Tetode Analisis Data .....	38
3.6 Keabsahan Data.....	41
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	43
A Lokasi Penelitian.....	43
B Jadwal Penelitian.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.1.1 Gambaran Umum BKKBN .....	45

4.1.2 Sejarah BKKBN.....	45
4.1.3 Visi dan Misi BKKBN.....	51
4.1.4 Struktur organisasi.....	52
4.1.5 Tugas dan Fungsi Pokok BKKBN .....	53
4.1.6 Evaluasi Program Keluarga Berencana Di Kota Batam .....	55
A. Indikator Efektivitas .....	55
B. Indikator Efisiensi.....	59
C. Insikator Kecukupan .....	66
D. Indikator Kesamaan.....	69
E. Indikator Ketanggapan.....	72
F. Indikator Ketepatangunaan .....	76
4.2 Pembahasan .....	80
4.2.1 Evaluasi Program Keluarga Berencana Di Kota Batam.....	81
A Indikator Efektivitas .....	82
B Indikator Efisiensi.....	83
C Indikator Kecukupan .....	84
D Indikator Kesamaan.....	85
E Indikator Ketanggapan .....	85
F Indikator Ketepatangunaan .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 SIMPULAN .....	88
5.2 SARAN .....	89
Daftar Pustaka .....	91

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA  
LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN  
LAMPIRAN IV DOKUMENTASI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menjadi permasalahan bagi negara-negara di dunia seperti Negara China, India, Brazil, dan juga mejadi permasalahan bagi negara yang penduduknya masih di bawah garis kemiskinan seperti di kawasan Sahara Afrika. Saat ini yang menjadi permasalahan besar di Indonesia juga adalah kemiskinan, yang jumlah penduduknya terbesar ke-empat di dunia. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendalikan berdampak kepada beberapa aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial, terutama peningkatan kualitas dan kehidupan mutu penduduk dalam SDA yang dibarengi dengan tidak terkendalinya jumlah penduduk. Menurut teori Robert Malthus pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi permasalahan karena manusianya yang semakin bertambah, sedangkan ketersediaan sumber daya alam dan lahan untuk tempat tinggal dan untuk lahan pertanian tidak bertambah justru semakin berkurang. Sedangkan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, dan papan semakin meningkat. Aspek kehidupan lainnya yang perlu diperhatikan, diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan. Berbagai layanan ekonomi seperti pasar, lapangan pekerjaan, ini juga berimbas kepada kebutuhan masyarakat akan infrastruktur dari masyarakat, seperti kebutuhan penunjang ekonomi. Apabila hal-hal semacam itu tidak dipenuhi oleh pemerintah maka akan berdampak pada menurunnya kualitas dan kesejahteraan masyarakat (Mandas, dkk. 2016)

Berikut adalah jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia diambil dari tahun 2010-2016 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

**Tabel 1.1 Data Jumlah Dan Pertumbuhan Penduduk Indonesia**

No	Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan
1	2010	237.600.000 Jiwa	-
2	2011	242.000.000 Jiwa	1.44%
3	2012	245.000.000 Jiwa	1.41%
4	2013	248.800.000 Jiwa	1.37%
5	2014	252.200.000 Jiwa	1.35%
6	2015	255.500.000 Jiwa	1.31%
7	2016	258.700.000 Jiwa	1.27%

(sumber :BPS and Beritagar.id 2016)

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tinggi, belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh BKKBN. Pertumbuhan penduduk dalam batas normal menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengakui laju pertumbuhan penduduk di Indonesia masih tinggi. Sampai saat ini, laju pertumbuhan penduduk masih mencapai 1,49 persen atau sekitar empat juta per Tahun 2016 di Kota Malang, Jawa Timur, pada hari Senin (26/9/2016). Surya menjelaskan, dengan jumlah laju pertumbuhan sebanyak itu, rata-rata wanita subur melahirkan 2-6 anak. Mestinya, sesuai dengan target, rata-rata wanita melahirkan 1-2 anak. Dengan begitu, laju pertumbuhan penduduk bisa ditekan mencapai angka ideal, yakni sekitar satu sampai dua juta per tahun. Ideal laju pertumbuhan penduduk satu sampai dua juta per-tahun sesuai target di 2025, ungkapnya. Surya mengatakan, banyak dampak yang akan timbul jika laju pertumbuhan penduduk berada diatas angka ideal. Salah satunya adalah terjadinya krisis pangan dan energi. Hal itu, menurut dia, akan berpengaruh terhadap

keberlangsungan hutan di Indonesia sebab dengan bertambahnya penduduk, secara bertahap hutan itu akan beralih fungsi (Hartik and Kompas.com 2016).

Dengan adanya permasalahan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka pemerintah sejak pada era orde baru sudah mengeluarkan program keluarga berencana (KB) meskipun hasilnya belum maksimal. Dengan permasalahan tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan untuk mengontrol jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia yang tinggi, yaitu Kebijakan Tentang Kependudukan berdasarkan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 11, pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pada pasal 53 ayat (1), disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN. BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden (BKKBN, 2017: 2), dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang pengembangan kependudukan, pembangunan keluarga berencana dan sistem informasi keluarga dengan menekankan pada kualitas penduduk dan juga menekan kuantitas penduduk melalui program keluarga berencana yang mempunyai sasaran yang ditentukan yaitu penurunan kelahiran (*fertilitas*).

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan

angka kelahiran yang pada tujuannya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil berkualitas. Program keluarga berencana merupakan suatu gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran, yaitu sesuai dengan Slogan BKKBN dua anak lebih baik. Prinsip dari program KKBPK yaitu, aspek pengendalian kuantitas penduduk, aspek peningkatan kualitas penduduk dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga agar terbebas dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan supaya keluarga lebih bahagia dan sejahtera. Program KB tidak hanya difokuskan di pusat, namun juga dilaksanakan di daerah, dengan adanya otonomi daerah yang mulai berlaku sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang saat ini telah di perbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka berbagai sektor sudah disentralisasikan ke daerah.

Di era otonomi daerah, BKKBN Provinsi Kepulauan Riau sejak Tahun 2005 telah mengoptimalkan upaya penanggulangan permasalahan kependudukan dan pembangunan keluarga. Namun demikian perkembangan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau bertambah padat. Secara kuantitatif, jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun sebanyak 1.515.294 jiwa, angka ini meningkat sebesar 62.211 jiwa (4,28 Persen) dibandingkan tahun 2008. Pertumbuhan jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah preventif yang dituangkan dalam kebijakan baik regulasi maupun non-regulasi, guna menyikapi permasalahan perkembangan penduduk. Namun upaya tersebut belum mendapat respon dan dukungan yang sinergis dari

pemerintah daerah, sehingga relatif belum ada kebijakan yang sejalan dengan apa yang digariskan oleh BKKBN Kepulauan Riau. Bahkan, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi ini belum memiliki kebijakan yang mendukung perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga termasuk Kota Batam (Triningsih, 2013:66-67).

Sejalan dengan apa yang sudah diamanatkan dalam otonomi daerah termasuk program keluarga berencana yang telah didesentralisasikan pada masing-masing daerah untuk mengontrol pertumbuhan penduduk dan untuk meningkatkan kualitas penduduk, dengan tujuan mengimplementasikan program KB supaya efektif agar penduduk di Kota Batam tidak meningkat dan bisa dikendalikan.

Program keluarga berencana bisa berjalan efektif dan sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah tergantung peran serta kepedulian masyarakat Kota Batam agar melaksanakan dan mengikuti program tersebut. Bagi kelancaran program tersebut agar dapat terpenuhinya program KB maka peran masyarakat yang aktif dan partisipatif sangat diperlukan.

Program keluarga berencana diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Batam ternyata masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, karena masih banyak dijumpai keluarga yang memiliki lebih dari dua anak yang tidak mengikuti anjuran dari program keluarga berencana dalam mengurangi tingkat kelahiran yaitu cukup dengan dua anak, hal ini yang menyebabkan semakin bertambahnya penduduk di Kota Batam, dengan peningkatan jumlah penduduk yang masih tinggi, dampak



dari program keluarga berencana masih belum sesuai dengan apa yang di cita-citakan dari kebijakan program keluarga berencana yaitu mengurangi angka kelahiran dan mengurangi laju pertumbuhan penduduk .

Berikut adalah jumlah penduduk Kota Batam dari tahun 2012-2017 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS)

**Tabel 1.2 Data Jumlah Penduduk Kota Batam**

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2012	1.047.534
2	2013	1.094.623
3	2014	1.141.816
4	2015	1.188.985
5	2016	1.236.399
6	2017	1.283.199

(Sumber : BPS Batam Tahun 2018)

Berdasarkan data diatas, setiap tahun jumlah penduduk Kota Batam terus mengalami peningkatan dan semakin bertambah pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Kota Batam sebanyak 1.047.534 jiwa, terjadi peningkatan kembali pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk 1.094.623 jiwa, terjadi peningkatan lagi pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk 1.141.816 jiwa, terus meningkat pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk 1.188.985 jiwa dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk 1.236.399 jiwa, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.283.199 Jiwa.

Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk berimbas kepada kesejahteraan penduduk di Batam. Dampak dari tingginya pertumbuhan penduduk salah satunya banyaknya pengangguran karena banyaknya perusahaan yang gulung tikar. Akibat banyaknya pengangguran berimbas kepada banyaknya kasus

kekinisan saat ini di Batam. Dari permasalahan tersebut program KB sangat diperlukan agar pertumbuhan penduduk bisa terkendali.

Masalah ini menjadi masalah yang menarik perhatian banyak pihak, sehingga para ilmuwan/akademisi sudah banyak yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah program keluarga berencana. Peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian tersebut dapat dibagi menjadi lima kelompok penelitian, yaitu *pertama*, penelitian yang membahas mengenai Implementasi Program Keluarga Berencana, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Bachtiar, Islamy, and Haryono n.d.), (Nunung, Nurjannah, and Susanti, 2018), (Purwandiyah, 2013) dan(Hidayat, 2018), (Bawing Fricilia, Padmawati Retna Sari, Wilopo Siswanto Agus, 2017), (Juliasti, Ays Abd. Kadir, Hak Nasrul, 2018), (Okriyanti, 2016), (Afiat Meri, Rahman, Muh. Elwan Laoede, 2018), (Paramithasari Anindya Wayan, 2015).*Kedua* penelitian yang membahas tentang peran Badan Kependudukan (Gustina, Irja, and Bahar 2018)dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Keluarga Berencana sama halnya yang dilakukan oleh (Lambelanova and Ramadhan, 2016). *Ketiga* penelitian yang membahas dampak dari Program Keluarga Berencana seperti penelitian yang dilakukan oleh (Darni and Faidah, 2016), dan (Soleha, 2016). *Keempat* penelitian yang membahas tentang Evaluasi Program Keluarga Berencana seperti penelitian yang dilakukan oleh (Suparman, Sakti, and Engkus, 2018), dan (Gustina et al, 2018).*Kelima*, penelitian tentang evaluasi Program KB, Seperti (Nanang, Tri, and Engkus 2018), (Mandas Israel Samuel Theodorus, Lengkong Florence Deisy Jetty, and Ruru Joordi 2016), (Nanang, Tri, and Engkus 2018), *Kelima*,

Efektivitas Program KB seperti, (FD, Sukirno, and Toti 2014), (Merrynce and Hidir Ahmad 2013).

Meskipun sudah banyak yang melakukan penelitian terkait program keluarga berencana, namun sayangnya belum ada yang melakukan penelitian terkait Evaluasi dampak dari program keluarga berencana dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam. Penelitian ini hadir untuk melakukan evaluasi dampak program keluarga berencana dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana Dampak Program Keluarga Berencana Dalam Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Batam.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Dampak Dari Program Keluarga Berencana Dalam Mengendalikan Laju Perumbuhan Penduduk Di Kota Batam.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu atau menjadi bahan masukan untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian ulang dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda dan informan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk *Stakeholders* yang mempunyai wewenang dalam bidang pengendalian laju pertumbuhan penduduk, khususnya melalui program Keluarga Berencana (KB).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*, kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi Kebijakan, dan ada juga yang menerjemahkan menjadi Kebijaksanaan. Meskipun demikian belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi Kebijakan atau Kebijaksanaan, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, publik *policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik (Anggara, 2014:35).

Thomas R. Dye menjelaskan kebijakan publik yaitu segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Angga, 2014:35).

Dalam kebijakan berdasarkan teori Charles L. Cochran & Eloise F. Malone dalam Islamy (2014:1.6) menyebutkan bahwa kebijakan adalah “*public policy consists of political decisions for implementing programs to achieve societal goals....public policy consists of a plan of action or program and a statement of objectives, in other words, a map and a destination*”. kebijakan publik terdiri dari berbagai keputusan politik untuk melaksanakan program-program demi tercapainya tujuan-tujuan masyarakat, kebijakan publik berisi sebuah rencana

tindakan atau program dan berupa pernyataan tujuan yang hendak dicapai, atau dengan kata lain, sebuah peta dan sebuah tujuan.

Kebijakan menurut Carl J. Friedrich dalam Suaib (2016) "*public policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose*". Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam kebijakan tersebut, maka kebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang telah dibuat dan diinginkan.

## **2.2. Formulasi Kebijakan**

Terdapat berbagai tahapan-tahapan dalam proses pembentukan kebijakan, yaitu mencakup (Suaib, 2016)

### **a. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan:**

Tahap pertama dalam perumusan kebijakan sosial adalah mengumpulkan data mengenai permasalahan sosial yang dialami masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.

### **b. Analisis Masalah dan Kebutuhan**

Tahap berikutnya adalah mengolah, memilah dan memilih data mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat yang selanjutnya dianalisis dan

ditransformasikan ke dalam laporan yang terorganisasi. Informasi yang perlu diketahui antara lain: apa penyebab masalah dan apa kebutuhan masyarakat? Dampak apa yang mungkin timbul apabila masalah tidak dipecahkan dan kebutuhan tidak dipenuhi? Siapa dan kelompok mana yang terkena masalah.

c. Penginformasian Rencana Kebijakan

Berdasarkan laporan hasil analisis disusunlah rencana kebijakan. Rencana ini kemudian disampaikan kepada berbagai sub-sistem masyarakat yang terkait dengan isu-isu kebijakan sosial untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Rencana ini dapat pula diajukan kepada lembaga-lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.

d. Perumusan Tujuan Kebijakan

Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat dilakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif-alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan-tujuan kebijakan.

e. Pemilihan Model Kebijakan

Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metode dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip-prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

f. Penentuan Indikator Sosial

Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator-indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil-hasil yang akan dicapai.

g. Membangun Dukungan dan Legitimasi Publik

Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negosiasi dan koalisi dengan berbagai kelompok-kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang akan diterapkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam membuat suatu kebijakan dibutuhkan suatu identifikasi, analisis, perencanaan, perumusan tujuan, pemilihan model, penentuan indikator sosial dan membangun dukungan dan legitimasi dari masyarakat atas isu dan permasalahan yang sedang terjadi.

### **2.3. Implementasi Kebijakan**

Menurut Meter dan Horn dalam Suaib (2016:82) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut *policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions* yaitu implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



Implementasi merupakan keputusan kebijakan dasar dalam bentuk Undang-Undang, ada juga yang bentuknya keputusan badan peradilan yang lainnya. Keputusan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dan bertujuan untuk mengatur proses penerapannya Mazmanian dan Sabatier dalam buku kebijakan publik (Anggara, 2012:532). Sedangkan Ripley dan Franklin menjelaskan implementasi merupakan setelah Undang-Undang ditetapkan, maka akan terjadi otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis *konkret output*. Berdasarkan tugas penerapannya ialah untuk membentuk suatu ikatan untuk mempermudah tujuan dari kebijakan agar dapat terealisasi sebagai dampak dari kegiatan dalam suatu pemerintah dalam buku kebijakan publik Winarno (2014:148). Berdasarkan fungsinya implementasi untuk menjalankan tujuan atau sasaran-sasaran dari kebijakan publik yang dibuat sebagai produk yang dikeluarkan oleh pemerintah oleh(Anggara, 2012).

Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ialah penerapan atau kegiatan dari peraturan atau kebijakan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan dan diharapkan dari kebijakan yang dibuat tersebut.

#### **2.4. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dari keseluruhan suatu proses kebijakan, salah satu contohnya ialah suatu aktivitas fungsional, sebelum aktivitas evaluasi kebijakan dilakukan tentunya harus mengikuti semua proses-proses yang dilakukan sebelumnya, ialah proses formulasi dan implementasi dari suatu kebijakan. Sehingga semua aktivitas fungsional yang dilakukan pada saat

proses dilakukannya suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik,(Suaib, 2016:107).

Evaluasi merupakan suatu usaha untuk mengetahui program tersebut dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Mokijat dalam (Suaib, 2016:107). Berbeda dengan Bryant dan White mereka mengemukakan evaluasi dalam bentuk upaya mendokumentasi apa yang terjadi dan mengapa terjadi. Intinya program dibuat untuk mengetahui sebab akibat, dengan begitu dapat diketahui perencanaan evaluasi upaya untuk mendapatkan kaitan antara sebab akibat kedepan (Suaib, 2016:107).

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dari keseluruhan suatu proses kebijakan, salah satu contohnya ialah suatu aktivitas fungsional, sebelum aktivitas evaluasi kebijakan dilakukan tentunya harus mengikuti semua proses-proses yang dilakukan sebelumnya, ialah proses formulasi dan implementasi dari suatu kebijakan. Sehingga semua aktivitas fungsional yang dilakukan pada saat proses dilakukannya suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik,(Suaib, 2016:107).

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses untuk menilai suatu kebijakan yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat, dan bertujuan untuk memperbaiki kebijakan yang dibuat agar menjadi lebih baik lagi, berdasarkan kekurangan-kekurang yang terdapat dalam suatu kebijakan tersebut.

#### **2.4.1. Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik**

Evaluasi kebijakan menurut Wiliam N. Dunn dalam Anggara (2014:276) berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik karena sebuah kajian evaluasi harus mampu memenuhi esensi akuntabilitas tersebut, antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program atau kebijakan.
- b. Mengukur kepatuhan, artinya mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Melakukan auditing untuk melihat *output* kebijakan sampai pada sasaran yang dituju, ada tidaknya kebocoran dan penyimpangan pada penggunaan anggaran, ada tidaknya penyimpangan tujuan dan pelaksanaan program.
- d. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan. Misalnya, seberapa jauh program yang dimaksud mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan.

#### **2.4.2. Indikator Evaluasi Kebijakan**

Dalam Mulyadi Menurut William N. Dunn (2016:124) terdapat enam indikator yang digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak, dan indikator inilah yang dipakai peneliti sebagai indikator dampak dari evaluasi program keluarga berencana dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam.

- a. *Effectivines* atau efektivitas, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

- b. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- c. *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- d. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- e. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai masyarakat.
- f. *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

#### **2.4.3. Dimensi Evaluasi**

Secara garis besar ada dua dimensi penting yang harus diperoleh informasinya dari studi evaluasi dalam kebijakan publik (Anggara, 2014:276-277) yaitu sebagai berikut :

- a. Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Kebijakan

Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan

sehingga akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektivitas, dan efisiensi kebijakan.

b. Evaluasi Kebijakan dan Dampaknya

Evaluasi kebijakan dan dampaknya, artinya mengevaluasi kebijakan serta kandungan programnya sehingga diperoleh informasi mengenai manfaat (efek) kebijakan, dampak (*outcome*) kebijakan, kesesuaian kebijakan/program dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan).

c. Dimensi Kajian pada Studi Evaluasi

Menurut Palumbo, dimensi pada studi evaluasi mencakup keseluruhan siklus dalam proses kebijakan, dari saat penyusunan desain kebijakan, implementasi, hingga selesai diimplementasikan. Jika dikaitkan dengan kebutuhan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi, dimensi evaluasi kebijakan meliputi penentuan agenda, pendefinisian masalah, *forecasting* (definisi sasaran), pendefinisian ukuran, distribusi masalah, analisis keputusan, desain kebijakan, analisis feasibilitas politik, terminasi, pooling dan survei, legitimasi kebijakan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dampak, dan implementasi.

#### **2.4.4. Pendekatan Evaluasi Kebijakan**

Beberapa pendekatan dalam evaluasi kebijakan menurut Dunn dalam (Mulyadi 125), yaitu :

- a. Evaluasi Semu (*pseudo evaluation*). Merupakan pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi

yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap Individu atau kelompok masyarakat secara keseluruhan.

- b. Evaluasi Formal (*formal evaluation*). Merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program.
- c. Pendekatan teori evaluasi adalah untuk menghasilkan suatu informasi yang valid mengenai hasil kebijakan yang dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan, yaitu dengan menggunakan pendekatan ini, yang di mana menggunakan metode-metode deskriptif.

Jadi dalam mengevaluasi suatu kebijakan menggunakan pendekatan-pendekatan evaluasi kebijakan di atas yang berguna sebagai panduan dalam melakukan evaluasi kebijakan.

## **2.5. Program**

Menurut Gittinger dalam Soleha (2016:42) mengungkapkan sesungguhnya program pada mulanya ialah kumpulan aktivitas yang dapat dihimpun dalam suatu kelompok kesatuan secara pribadi ataupun bersamaan untuk mencapai visi dan misi yang sama.

Program ialah aktivitas yang telah dibentuk dan direncanakan dengan baik agar yang dimaksudkan untuk mencapai target yang telah ditentukan yang telah direncanakan yang telah disepakati bersama. Program yang telah disusun dengan

baik akan berdampak dari pelaksanaan sampai kepada tercapainya hasil yang baik (Soleha, 2016:43).

Seperti hal yang diungkapkan oleh Nugroho dalam Mulyadi (2016:78) bahwa program itu merupakan kesatuan dari proyek-proyek yang mempunyai ikatan target yang sama terdiri dari beberapa proyek tersebut. Sementara itu program menurut Jones ialah doktrin ke dalam kerangka yang aktual dan penempatan dari energi dan sumber daya lainnya dari organisasi itu sendiri dan kaitannya dengan lingkungan luar organisasi. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ialah seperangkat aktivitas yang ingin dikerjakan dengan menggunakan sumber daya yang sudah ada supaya mencapai hasil yang bermanfaat. Program yang direncanakan harus mempunyai ciri-ciri sama halnya dengan program wajib memiliki pembatas yang jelas bisa dihitung, harus bisa dimanfaatkan sebagai solusi supaya dapat di pertimbangkan setiap aktivitas dalam tercapainya target serta bisa dijumlahkan dengan analisa biaya yang dikeluarkan, jadi memiliki target yang jelas dan hasil dari pencapaian suatu program bisa dihitung dari pengeluarannya.

Program ialah suatu yang dihasilkan dari pemerintah serta dilaksanakan oleh pegawai dari instansi pemerintahan yang melibatkan dari semua unsur masyarakat. Dengan seperti ini program yang dibuat akan menambah kepercayaan dari masyarakat, sehingga semua unsur masyarakat berusaha untuk mematuhi program tersebut, sehingga mereka beranggapan bahwa sebagai warga negara yang baik mereka harus mematuhi program yang dibuat oleh pemerintah.

Menurut Soesilo Zauhar dalam Purwandiyah (2013:128) suatu program agar dapat terlaksana dengan baik harus memiliki ciri-ciri:

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan dari peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan
3. Suatu kerangka kebijakan yang konsisten dan proyek-proyek yang saling berkaitan untuk mencapai program selektif mungkin.
4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dari program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan lain demi usahapembangunan tidak berdiri sendiri.
6. Berbagai upaya dibidang manajemen termasuk penyediaan pembiayaan dan lain-lain untuk dilaksanakan dengan program tersebut.

## **2.6. Evaluasi Program**

Evaluasi program menurut Ralp Tylor dalam Akbar (2016:52) adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Sedangkan Cronbach dan Stufflebeam dalam Akbar (2016:52) menjelaskan evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Menurut Suharsmi Arikunto dan Cepi Safrudin (Akbar 2016:53) mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari penjelasan di atas, bahwa evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerja tidaknya sesuatu program pemerintah, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk



menentukan alternatif atau pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan.

Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai dalam mengevaluasi program pembelajaran. Berikut akan diuraikan beberapa model evaluasi program yang populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program yaitu:

1. Evaluasi Model *Kirkpatrick*

Kirkpatrick salah seorang ahli evaluasi program pelatihan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM). Model evaluasi yang dikembangkan oleh *Kirkpatrick* dikenal dengan istilah *Kirkpatrick Four Levels Evaluation Model*. Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan (training) menurut Kirkpatrick mencakup empat level evaluasi, yaitu: level (1) *reaction*, level (2) *learning*, level (3) *behavior*, dan level (4) *result*.

2. Model Evaluasi *CIPP*

Model evaluasi *CIPP* yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. *Stufflebeam* mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan. Model evaluasi *CIPP* ini terdiri dari 4 komponen yaitu : Evaluasi konteks, Input evaluasi, Evaluasi proses, Evaluasi produk/ hasil dan Evaluasi Model *Provus*.

### 3. Evaluasi Model *Wheel (roda)* dari *Beebe*

Model evaluasi ini berbentuk roda karena menggambarkan usaha evaluasi yang berkaitan dan berkelanjutan dan satu proses ke proses selanjutnya. Model ini digunakan untuk mengetahui apakah pelatihan yang dilakukan suatu instansi telah berhasil, untuk itu diperlukan lah sebuah alat untuk mengevaluasinya. Secara singkat, model *wheel* ini mempunyai 3 tahap utama. Tiga tahap tersebut adalah pembentukan tujuan pembelajaran, pengukuran *outcomes* pembelajaran, dan penginterpretasian hasil pengukuran dan penilaian.

### 4. Evaluasi Model *Provus*

Evaluasi kesenjangan program, begitu orang menyebutnya. Kesenjangan program adalah sebagai suatu keadaan antara yang diharapkan dalam rencana dengan yang dihasilkan dalam pelaksanaan program. Evaluasi kesenjangan dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara standard yang sudah ditentukan dalam program dengan penampilan aktual dari program tersebut. Dengan demikian tujuan dari model ini adalah untuk menganalisis suatu program sehingga dapat ditentukan apakah suatu program layak diteruskan, ditingkatkan dan sebaliknya yang disesuaikan dengan standar, *performance*, dan *discrepancy*.

### 5. Evaluasi Model *Stake*

Stake menekankan adanya dua dasarkegiatan dalam evaluasi, yaitu *description* dan *judgement* dan membedakan adanya tiga tahap dalam program pendidikan yaitu *context*, *process* dan *outcomes*. Stake menyatakan bahwa apabila menilai suatu program pendidikan, maka harus melakukan perbandingan yang relatif antara satu program dengan yang lainnya. Dalam model ini *antecedent* (masukan), *transaction* (proses) dan *outcomes* (hasil) data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program.

#### 6. Evaluasi Model *Brinkerhoff*

*Brinkerhoff & Cs* mengemukakan tiga golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, seperti evaluator-evaluator lain, namun dalam komposisi dan versi mereka sendiri sebagai berikut : *Fixed vs Emergent Evaluation Design*, *Formative vs Summative Evaluation*, *Desain eskperimental dan desain quasi eskperimental vs natural inquiry*.

### **2.7. Program Keluarga Berencana (KB)**

Keluarga berencana modern di Indonesia, mulai dikenal pada tahun 1953. Sekelompok ahli kesehatan, kebidanan, dan tokoh masyarakat telah mulai membantu masyarakat memecahkan masalah-masalah penduduk. Pada tanggal 23 desember 1957, mereka mendirikan wadah dengan nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan bergerak secara *silent operation* membantu

masyarakat memerlukan bantuan secara sukarela. Jadi, PKBI adalah pelopor pergerakan Keluarga Berencana Nasional. Berdasarkan hasil penandatanganan Deklarasi Kependudukan PBB 1967 oleh beberapa kepala negara, maka dibentuklah suatu lembaga program keluarga berencana dan dimasukkan dalam program pemerintah sejak Pelita I berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1968 yang dinamakan lembaga keluarga Berencana Nasional (LKBN) sebagai lembaga semi pemerintah. Pada tahun 1970, melalui Kepres No. 8 tahun 1970 diubah menjadi badan Pemerintrah dengan nama Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertanggungjawab kepada presiden dan bertugas mengoordinasikan perencanaan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan program keluarga berencana (Purwoastuti & dkk, 2015:183-184).

Istilah Keluarga Berencana pada mulanya berasal dari bahasa inggris yaitu *family planning* atau *planned parenthood* yang berarti usaha bagaimana merencanakan suatu keluarga. Suparlan memberikan definisi tentang Keluarga Berencana atau *family planning* adalah daya upaya manusia untuk mengatur atau membatasi kelahiran, baik untuk sementara agar dapat dicapai jarak yang diharapkan antar dua kelahiran, maupun untuk selamanya agar dapat mencegah bertambahnya anak, demi kesejahteraan keluarga (Muttaqin, 2016:693).

UU No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan keluarga memberikan definisi bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas (Muttaqin, 2016:693). Keluarga berencana

merupakan usaha suami-istri untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Usaha yang dimaksud termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Prinsip dasar metode kontrasepsi adalah mencegah sperma laki-laki mencapai dan membuahi telur wanita (*fertilisasi*) atau mencegah telur yang sudah dibuahi untuk berimplantasi (melekat) dan berkembang dalam rahim (Purwoastuti & dkk, 2015:184).

Hanafi Hartanto dalam Soleha (2016:41) menjelaskan pengertian Keluarga Berencana (KB) sebagai suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral Pancasila, demi untuk mendapatkan kesejahteraan keluarga khususnya dan kesejahteraan bangsa umumnya.

Keluarga berencana adalah merupakan program pemerintah sebagai salah satu usaha menunjang pembangunan yakni untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang demikian pesatnya, agar pertumbuhan penduduk itu dapat diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi. Tingginya angka kelahiran yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk dengan cepat apabila tidak diatur dengan baik akan menimbulkan berbagai hambatan dalam proses pembangunan (Muttaqin, 2016:693). Program Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program untuk membantu keluarga termasuk individu merencanakan kehidupan berkeluarganya dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, dan dukungan yang diperlukan. Untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah jarak,

dan usia ideal melahirkan anak, pengaturan kehamilan serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Muttaqin 2016).

Di dalam menjalankan program KB (Keluarga Berencana) tentunya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Juliantoro berpendapat bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program KB, yaitu dalam hal kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan(Soleha, 2016:43).

Program keluarga berencana memiliki 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu sebagai berikut (Sukis, 2015):

#### 1. Tujuan Umum

- a. Peningkatan kualitas penduduk dan keluarga melalui keluarga berencana.
- b. Kesehatan reproduksi remaja.
- c. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- d. Penguatan dan kelembagaan keluarga kecil.
- e. Pengelolaan sumberdaya manusia dan aparatur penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana.
- b. Meningkatkan upaya pemberdayaan dan ketahanan keluarga.
- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi remaja.
- d. Memantapkan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya manusia aparatur.
- f. Meningkatkan hasil guna dan daya guna penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintah.

Program keluarga berencana juga memberikan keuntungan ekonomi pada pasangan suami-istri, keluarga, dan masyarakat. Perencanaan KB harus dimiliki oleh setiap keluarga termasuk calon pengantin, misalnya kapan usia ideal untuk melahirkan, berapa jumlah anak, dan jarak kelahiran yang ideal, bagaimana perawatan kehamilan, serta tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Pasangan suami-istri harus memiliki akses terhadap pelayanan kontrasepsi yang berkualitas. Sehingga, mereka mudah merencanakan kehamilan seperti yang diinginkan dan menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, program KB menjadi salah satu program pokok dalam meningkatkan status kesehatan dan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak (Purwoastuti & dkk, 2015: 185). Selain itu, dalam menjalankan program KB (Keluarga Berencana) tentunya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Juliantoro berpendapat bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program KB, yaitu dalam hal kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (Soleha, 2016:43).

Dalam melaksanakan program KB tentunya memiliki dampak baik itu dampak positif maupun negatif. Glasier dalam Soleha (2016:43) menjelaskan bahwa di dalam program KB itu mempunyai dampak positif, yaitu penurunan angka kepadatan penduduk, penanggulangan kesehatan reproduksi, peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain itu, Glasier juga menjelaskan beberapa dampak negative didalam program KB, yaitu efek samping dari program Keluarga Berencana terhadap kesehatan, dan besarnya anggaran pengadaan alat-alat kontrasepsi.

## **2.8. Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini perlu dibahas karena sangat berguna dalam memberikan masukan dan sebagai bahan perbandingan. Hasil penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Suparman, Fadjar Trisakti & Engkus yang berjudul Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat, 2018, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Volume 6, Nomor 2, e-ISSN 2550-1305, p-ISSN 2549-1660, DOI 10.31289, Hal. 122-131. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peran aktif masyarakat/kelompok relawan pada kegiatan pelayanan KB, tersedianya sumber daya manusia, dana, waktu pelaksanaan, namun dengan tidak adanya indikator keberhasilan, belum adanya SOP pada evaluasi proses dan evaluasi produk maka hasil evaluasinya tidak dapat menjadi masukan yang jelas dalam siklus program keluarga berencana secara keseluruhan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Heny Purwandiyah yang berjudul Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera (Studi di Kec. Telen Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur), Jurnal Paradigma, Volume 2, Nomor 1, April 2013, ISSN 225-4266, Hal. 127-132. Hasil penelitian Secara kasus tujuan penelitian ini adalah untuk menunjang visi program KB Nasional yaitu



mewujudkan keluarga berkualitas 2016 dan untuk menciptakan kondisi lingkungan keluarga yang kondusif agar keluarga mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara optimal berdasarkan sensus 2002 jumlah penduduk miskin di Kecamatan Telen mencapai 1676 keluarga miskin (BPS Kutim 2006) disebabkan oleh rendahnya pendidikan, jumlah anak banyak, penghasilan tidak tetap dan rendah oleh karena itu program keluarga berencana untuk membangun masyarakat sejahtera di Kecamatan Telen sangat dibutuhkan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Hidayat yang berjudul Strategi Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Angka Fertilitas (Studi Akseptor KB Desa Bandung, Diwek, Jombang), Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 23 , Nomor 2, jun 2018, e-ISSN 9251, p-ISSN 0853, Hal 107-112. Hasil penelitian sulitnya implementasi program keluarga pada dasarnya dapat diatasi melalui beberapa cara. Selain praktik hegemoni untuk mendapatkan persetujuan mengenai program tersebut, cara yang dilakukan melalui normalisasi – regulasi dan panopticon. Metode ini dipandang lebih efektif dibanding dengan cara-cara yang lain. Implementasi program keluarga berencana saat ini lebih banyak mendapatkan resistensi kultural. Kondisi tersebut disebabkan oleh ketiadaan akses untuk mendapatkan pemahaman mengenai kontrasepsi. Selain itu pemahaman banyak anak banyak rejeki masih di anggap sebagai suatu kebenaran yang mendarah daging di masyarakat sehingga banyak pasangan usia subur enggan menggunakan

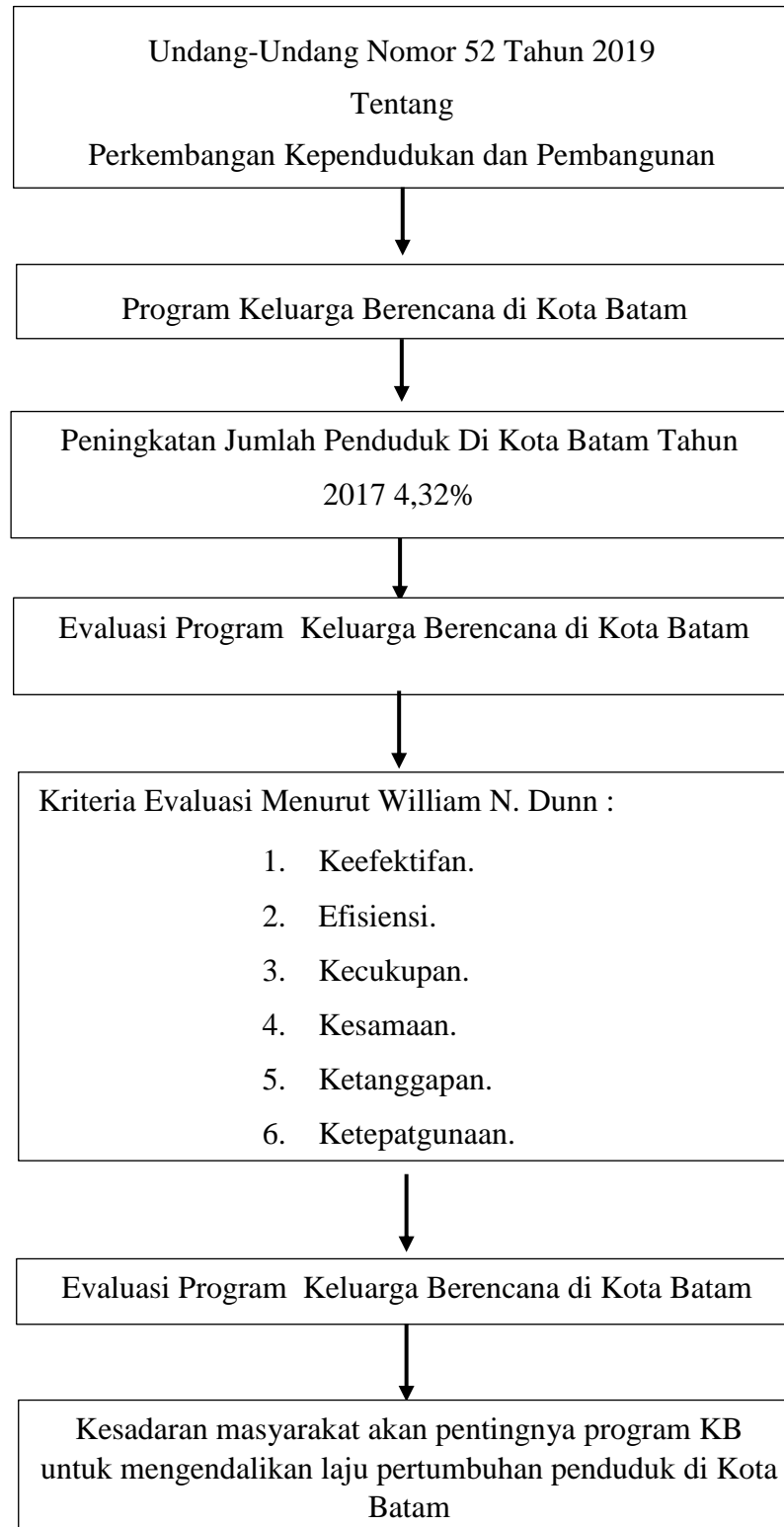
alat kontrasepsi. Melalui dua hal tersebut, anggapan mengenai penggunaan alat kontrasepsi yang selama ini dianggap sesuatu yang tabu dan dilarang menjadi suatu kebenaran yang harus dilakukan bahkan menjadi gaya hidup oleh pasangan usia subur dewasa ini.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aminatuz Zuhriyah, Sofwan Indarjo, Bambang Budi Raharjo yang berjudul Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana, Jurnal UNES, Volume 1, Nomor 4, Tahun 2017, e-ISSN1475-222656, Hal. 1-14. Hasil penelitian Indikator input dari program kampung keluarga berencana belum sepenuhnya terpenuhi. Secara teknis dilapangan jumlah kader yang bekerja belum sesuai karena masih ada petugas yang merangkap tugas lain. Belum ada anggaran yang tersedia untuk kegiatan kampung keluarga berencana anggaran yang ada hanya untuk persiapan dan untuk pembentukan kampung keluarga berencana. Indikator proses belum sepenuhnya terpenuhi. Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan rencana awal kegiatan. Pada saat pembinaan tidak semua kader hadir dalam kegiatan pembinaan tersebut. Kegiatan BKB, BKR, BKL dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan PKK. Pada saat kegiatan PKK tidak semua ibu rumah tangga hadir dalam kegiatan PKK. Sehingga tidak semua ibu rumah tangga mendapatkan pembinaan mengenai BKB BKL dan BKR. Alasan yang menjadi penyebab ketidak hadiran ibu rumah tangga karena mereka lebih memilih untuk bekerja dari pada hadir pada saat kegiatan PKK. Beberapa indikator output dari program kampung

keluarga berencana belum terpenuhi. Dari duapuluh indikator keberhasilan output hanya ada sepuluh indikator yang dapat terpenuhi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Soleha yang berjudul Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara, eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2016, ISSN 2477-2458, Hal. 39-52. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan program KB masyarakat dapat lebih fokus dalam menentukan masa depan keluarga dikarenakan beban keluarga yang stabil dengan berkurangnya angka kelahiran serta hubungan antara istri dan suami dapat saling membantu dalam mensejahterakan keluarga serta tidak mempengaruhi keharmonisan keluarga. Adapun dampak negatif dari program KB terhadap pengguna KB yaitu perubahan berat badan, sehingga dapat mengurangi gairah seksualitas suami terhadap istri. Namun hal ini hal ini dianggap hal yang wajar dan tidak dianggap sebagai masalah yang besar terhadap kesehatan. Di samping itu dampak negatif program KB dalam penelitian ini dapat dikatakan sangat kecil.

## 2.9. Kerangka Pemikiran



*Gambar 2.1 Tahapan Evaluasi program Keluarga Berencana.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Bedasarkan tujuan penelitian, penelitian ini adalah penelitian terapan yang dimana penelitian terapan adalah penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Berdasarkan tingkat kealamiah tempat penelitian, penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode survey dimana metode survey adalah, metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, tetapi misalnya dengan mengedat kuesioner, tes, wawancara terstruktur dan sebagainya.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, ada yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah (Sugiono, 2014:207). Menurut Spradly dalam Sugiono (2014:208) fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam skripsi lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Apabila tidak dibatasi maka penelitian tersebut tidak akan usai sebab data yang didapat di lapangan melebihi dari tujuan awal peneliti. Selain itu fokus penelitian juga berfungsi sebagai pedoman sebuah penelitian sehingga penelitian tersebut sesuai dengan tujuan awal penelitian yang telah ditetapkan. Dengan bimbingan dan arahan dari suatu fokus, peneliti tahu persis data mana dan data

tentang apa yang perlu dikumpulkan. Fokus penelitian pada dampak dari program Keluarga Berencana dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Batam. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Effectiveness* atau keefektifan, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. *Efficiency* atau efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. *Adequacy* atau kecukupan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. *Equity* atau kesamaan, yaitu erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
5. *Responsiveness* atau ketanggapan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai masyarakat.
6. *Appropriateness* atau ketepatangunaan, yaitu yang berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang hal ini tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

### 3.3. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu primer dan sekunder.

#### 1. Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari narasumber atau informan. Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan dilakukan dengan sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut merupakan kriteria narasumber atau informan yang di pilih dalam penelitian ini :

- a. Informan yang benar-benar mengetahui permasalahan, serta terlibat langsung dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian ini dan biasanya ditandai oleh kemampuan penyampaian informasi secara spontan atau di luar kepala ketika menjawab suatu pertanyaan.
- b. Informan yang masih berperan aktif dalam lingkungan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Informan mempunyai integritas dan cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Informan dari akademisi yang terlibat langsung dan mengetahui program untuk diminta informasi.

**Tabel 3.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Jenis Kelamin P/L	Jabatan	Instansi/Alamat
1.	Dina Mariana	P	Kasubbid Pengendalian Penduduk	BKKBN
2.	Indah Mastikana	P	Sekretaris Prodi Kebidanan	AKADEMISI STIKES AWALBROS
3.	Rahmatia	P	Masyarakat	NONGSA
4.	Rukniati	P	Masyarakat	NAGOYA
5.	Rahmida	P	Masyarakat	KAMPUNG KB DAPUR 12

## 2. Data sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dapat berupa dokumen (arsip), yaitu buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan sumber arsip lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari data empiris dalam rangka membangun teori. Proses pengumpulan data ini dijelaskan Nasution (Sugiyono, 2016:222) meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Memasuki lokasi penelitian (*getting in*).
- b. Berada dilokasi penelitian (*getting along*).
- c. Pengumpulan data (*logging data*).

## 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga macam teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara mendalam, merupakan pertemuan langsung antara peneliti dan informan, untuk mendapat gambaran guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dan tidak dapat ditemukan melalui observasi. Dalam penelitian



ini peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) di Kantor perwakilan Kepulauan Riau di Kota Batam maupun dari pihak luar yang terkait dengan penelitian ini.

2. Observasi, istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
3. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data. Dokumen merupakan sumber data peneliti dalam bentuk tulisan, gambar, foto sebagai bahan tambahan untuk penelitian.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif akan berlangsung bersamaan dengan bagian-bagian lain dari pengembangan penelitian kualitatif, yaitu pengumpulan data dan penulisan temuan. Ketika wawancara sedang berlangsung misalnya peneliti dapat menganalisis wawancara yang dikumpulkan sebelumnya, menuliskan memo yang pada akhirnya dimasukkan sebagai narasi dalam laporan akhir, dan menyusun struktur laporan akhir.

Teknik Analisis Data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2016:244) yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles and Huberman (Sugiyono, 2016:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datannya sudah jenuh.

Aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya,

2. Reduksi Data

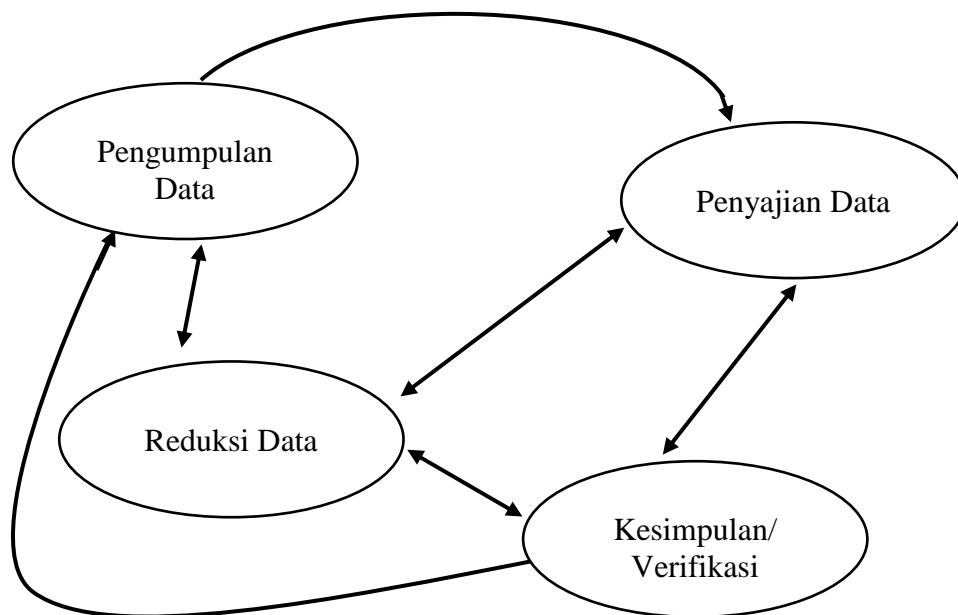
Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian

4. Verifikasi atau penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya.



Gambar 3.1 : Alur Analisis Data

*Sumber : Sugiyono, 2014:24*

*Pertama*, Kegiatan reduksi data, pada tahap ini terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari catatan di lapangan. Dalam proses ini dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses reduksi ini dilakukan secara bertahap selama penelitian dan sesudah sampai laporan hasil. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya serta mencari apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan komputer atau laptop.

*Kedua*, penyajian data dalam kegiatan ini peneliti menyusun kembali data yang didapatkan berdasarkan klasifikasi dari masing-masing data yang sejenis dipisahkan, dengan adanya penyajian data maka akan mempermudah untuk

memahami apa yang terjadi dan merencanakan penelitian selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

*Ketiga*, Data yang sudah dikelompokkan yang sesuai dengan kebutuhan kemudian diteliti kembali dengan cermat mana data yang sudah lengkap dan mana data yang belum lengkap dan yang masih memerlukan data tambahan, dan kegiatan ini dilakukan selama penelitian.

*Keempat*, Setelah data yang didapatkan dianggap cukup dan telah sampai di titik jenuh atau sudah memperoleh kesesuaian maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun hasil laporan hingga pada akhir pembuatan kesimpulan.

### **3.6. Keabsahan Data**

Salah satu cara penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi penelitian, metode, teori dan sumber data. Tahap pengujian keabsahan data dalam penelitian ini merupakan suatu tahapan yang berjalan beriringan dengan proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dimaksudkan menjadi perangkat pembantu bagi peneliti. Menurut Norman K. Denkin triangulasi digunakan sebagai gabungan dari beberapa metode yang dipakai untuk mengkaji suatu hal yang saling berkaitan dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Menurut Norman K. Denkin triangulasi terdiri dari empat hal :

1. Triangulasi Metode. Triangulasi metode ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika

data itu sudah jelas naskah atau teks, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan.

2. Triangulasi antar peneliti. Triangulasi ini dilakukan dengan cara lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data harus telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak merugikan peneliti.
3. Triangulasi sumber data Triangulasi ini menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya dengan wawancara, observasi, catatan pribadi serta dokumentasi.
4. Triangulasi teori. Yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Dimana informasi tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari hasil yang tidak sesuai dengan kesimpulan yang dihasilkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber data. Proses triangulasi dilakukan dengan cara terus-menerus sepanjang proses pengumpulan data dan analisis data sampai peneliti yakin tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi yang harus dikonfirmasi lagi kepada informan dengan cara mengecek ulang informasi atau jawaban yang diberikan oleh informan. Setelah hasil wawancara dan observasi dibuat, peneliti menanyakan kembali kepada informan supaya informasi yang telah diberikan benar-benar konsisten dan valid pada saat wawancara dan observasi untuk

menghindari salah tafsir, serta untuk menggali kembali pertanyaan yang sebelumnya diberikan kepada informan untuk menggali informasi yang baru.

Selanjutnya hal yang penting dalam penelitian ini yaitu pada tingkat keabsahan data melalui referensi atau sumber. Hasil yang telah disusun selanjutnya diperbandingkan dengan data yang telah diperoleh melalui tape recorder, kamera foto dan perlengkapan lainnya yang membantu mempermudah proses penelitian.

### **3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau yang berlokasi di Jl. Laksamana Komplek 2000 Nomor 01 Kota Batam, Taman Baloi, 01 Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Alamat informan ibu Rahmi yaitu Perumahan Sagulung, informan 2 Perumahan permata Bandara Nongsa, informan Ibu Rukniati di Perumahan Seraya. Alasan penentuan lokasi penelitian karena Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPNK) yang bertugas mengoordinasikan perencanaan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan program keluarga berencana.

